

LAMPIRAN IV

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : ..... /TAHUN 2018

TANGGAL : ..... 2018

**INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN**

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2038)
<b>I. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG LAUT</b>								
<b>A. Perwujudan Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan, dan Pusat Industri Kelautan</b>								
1. Pembangunan sarana dan prasarana sentra kegiatan perikanan tangkap, dan/atau perikanan budidaya sebagai pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan	1. Kabupaten Bone Bolango 2. Kabupaten Tojo Una-Una 3. Kabupaten Pohuwato 4. Kota Gorontalo 5. Kabupaten Parigi Moutong	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemen ATR, Kemen PUPERA, Kemendagri					
2. Pembangunan sarana dan prasarana sentra industri penggaraman	Kabupaten Pohuwato.	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemen ATR, Kemen PUPERA, Kemendagri					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2038)
<b>B. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut</b>								
1. Klasifikasi Kepelabuhanan Perikanan								
a. Peningkatan kapasitas pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring dalam rangka pengembangan kawasan Teluk Tomini	1. Pelabuhan Perikanan Tenda di Kota Gorontalo; 2. Pelabuhan Perikanan Tilamuta di Kabupaten Boalemo; 3. Pelabuhan Perikanan Parangi di Kabupaten Parigi Moutong; 4. Pelabuhan Perikanan Inengo di Kabupaten Bone Bolango; dan 5. Pelabuhan Perikanan Pagimana di Kabupaten Banggai.	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda, KemenPUPE RA					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2038)
<b>II. PERWUJUDAN POLA RUANG LAUT</b>								
<b>A. Perwujudan Kawasan Pemanfaatan Umum</b>								
1. Zona Perikanan								
1.a. Zona Perikanan Tangkap	Lampiran II							
a. Peningkatan pengelolaan SDI yang berkelanjutan		APBN, APBD	KKP, Pemda					
b. Peningkatan armada perikanan yang modern, efisien, dan berdayasaing		APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					
c. Pengembangan usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di zona perikanan		APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					
d. Peningkatan efektifitas perijinan perikanan tangkap nasional.		APBN, APBD	KKP, Pemda					
e. Peningkatan kapasitas dan perlindungan terhadap pelaku kegiatan penangkapan ikan di zona perikanan tangkap		APBN, APBD	KKP, Pemda					
f. Peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.		APBN, APBD	KKP, Pemda					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2038)
g. Penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan		APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, LIPI					
1.b. Zona Perikanan Budidaya	Lampiran II							
a. Peningkatan pengelolaan zona perikanan budidaya laut dalam (keramba jaring apung lepas pantai)		APBN, APBD	KKP, Pemda					
b. Peningkatan pengelolaan penyediaan pakan ikan		APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					
c. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana usaha pembudidayaan ikan laut dalam		APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					
d. Pengembangan usaha pembudidayaan ikan, khususnya budidaya laut dalam (keramba jaring apung lepas pantai)		APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenko Maritim, KKP, LIPI, dan Pemda					
2. Zona Energi	Lampiran II							
a. Penyiapan masterplan pengembangan energi baru dan terbarukan		APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen-ESDM, LIPI, KKP					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2038)
b. Pembangunan infrastruktur energi baru dan terbarukan		APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen-ESDM					
c. Pembangunan fasilitas pendukung untuk pengembangan energi baru dan terbarukan		APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen-ESDM					
d. Pengelolaan zona energi secara efektif dan berkelanjutan		APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen-ESDM					
3. Zona Pariwisata	Lampiran II							
a. Penyiapan masterplan pengembangan zona pariwisata		APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenpar, KKP, Pemda					
b. Pengembangan destinasi wisata di perairan sepanjang garis khatulistiwa dalam kawasan Teluk Tomini		APBN, APBD	Kemenpar, KKP, Pemda					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2038)
c. Pembangunan sarana prasarana pengelolaan sampah termasuk di pesisir dan pulau-pulau kecil		APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenpar, KKP, Kemen-PUPR, Kemenhub, Kemen-LHK, Pemda					
d. Pembangunan fasilitas pendukung dan infrastruktur pariwisata		APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenpar, KKP, Kemen-PUPR, Kemenhub, Pemda					
e. Peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola zona pariwisata		APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenpar, KKP, Pemda					
<b>B. Perwujudan Kawasan Konservasi</b>								
1. Kawasan Konservasi Perairan (KKP)	Lampiran II							
a. Identifikasi potensi pengembangan kawasan konservasi		APBN, APBD	KKP, Pemda					
b. Penetapan KKP		APBN, APBD	KKP					
c. Penataan Batas KKP		APBN, APBD	KKP					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2038)
d. Pengelolaan KKP secara efektif		APBN, APBD	KKP					
<b>C. Perwujudan Alur Laut</b>								
1. Alur Pelayaran	Lampiran II							
a. Pembangunan dan peningkatan operasionalisasi prasarana dan sarana jaringan pelayaran		APBN	Kemenhub					
b. Pengembangan Sistem Konektivitas Transportasi Kelautan melalui Peningkatan Pelayaran		APBN	Kemenhub					
c. Peningkatan dan pengembangan pelayaran internasional, nasional, dan regional		APBN	Kemenhub					
2. Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	Lampiran II							
a. Penyiapan masterplan pemasangan jaringan pipa/kabel bawah laut.		APBN	Kemenhub, Kominfo, Kemen-ESDM					
b. Penyiapan peraturan terkait izin lokasi dan izin pengelolaan di laut untuk jaringan pipa/kabel bawah laut dan/atau bangunan dan instalasi di laut		APBN	Kemenhub, Kominfo, Kemen-ESDM					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2038)
d. Pengembangan jaringan pipa/kabel bawah laut		APBN, investasi dunia usaha	Kemenhub, Kominfo, Kemen-ESDM					
3. Alur Migrasi Biota Laut	Lampiran II							
a. Identifikasi dan pemetaan alur migrasi biota laut (penyu, hiu paus, cetacean, ikan tuna, dan ikan sidat)		APBN, APBD, kerjasama pendanaan	KKP, Kemen-LHK, Pemda, LSM					
b. Peningkatan perlindungan dan pelestarian alur migrasi biota laut.		APBN, APBD, kerjasama pendanaan	KKP, Kemen-LHK, Pemda, LSM					
c. Pencegahan dampak lingkungan terhadap alur migrasi biota laut		APBN, APBD, kerjasama pendanaan	KKP, Kemen-LHK, Pemda, LSM					
<b>D. Perwujudan Kawasan Pemanfaatan Umum Yang Memiliki Nilai Strategis Nasional</b>								
1. Proyek Strategis Nasional								
a. Jalan Palu - Parigi di Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah	APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ATR/BPN, KemenPUPE RA, Kemenhub					



USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 - 2019)	(2020 - 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2038)
b. Pembangkitan Tenaga Listrik	1. Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 2. Kabupaten Pohuwonto, Provinsi Gorontalo 3. Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo 4. Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo 5. Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo 6. Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah 7. Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah 8. Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah 9. Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah	APBN, investasi dunia usaha						